

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. Ke 1 Edisi IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aulia N, 2007, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cet. Ke 3, CV. Nuansa Aulia
- HS Salim, Nubani E S, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. Ke 2, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Irsan, Koesparmono, Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Erlangga.
- Suratman, Dillah P, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 1, Alfabeta, Bandung.
- Suwondo C, *Outsourcing, implementasi di Indonesia*, Elex Media Computindo, Jakarta, hal. 2
- Tunggal H S, 2014, *Asas-asas Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo
- Yasar, Iftida, 2012, *Outsourcing Tidak Akan Bisa Dihapus*, PT Pelita Fikir Indonesia, Jakarta.

B. Artikel, Jurnal, Hasil Penelitian, Makalah, dan Dokumen.

- Indra, Tesis, 2014 “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Dalam Sistem Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Jatmiko, Bambang, Tesis, 2011 “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi pekerja adalah hal terjadi Penangulangan Perusahaan (Studi Kasus di Kota Batam)*”, Universitas Gadjah Mada Jakarta

Soemantri, Deden, Tesis, 2016 *“Tinjauan Yuridis Kegiatan Alih Daya (Outsourcing) Tenaga Kerja Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK”*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Wahyudi, Slamet, Tesis, 2011 *“Analisis Yuridis Mengenai Keberadaan Tiga Buah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. “X” Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”*, Universitas Gadjah Mada Jakarta

Pedoman Penyuluh Perjanjian Kerja (PK), Departemen Tenaga Kerja, dan Transmigrasi RI, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial, 2003, hlm 11-13.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan urutan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit

D. Jurnal Online

<http://belajarlukumindonesia.blogspot.co.id/2010/03/azas-azas-perundang-undangan.html>; 1/19/2017; 3:38PM.

<http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html>; 1/15/2017; 1:38 PM

Tambusai, M, 2005, Pelaksanaan Outsourcing (alih daya) ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan tidak mengaburkan hubungan industrial.
[http://www.nakertrans.go.id/arsip berita/naker/outsourcing.php](http://www.nakertrans.go.id/arsip%20berita/naker/outsourcing.php). 29 Mei 2005

<http://jawarakaruhun.blogspot.co.id/2015/11/contoh-jurnal-ketenagakerjaan.html>: 1/15/2017; 2:21PM

<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=103401&fyp=potongan&potongan=S2-2016-294945-introduction.pdf>, diakses 3 April 2017